

KONTRIBUSI TERMINAL PETIKEMAS PALARAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA

Nurmia¹, Nur Fitriyah², Burhanudin³

Abstrak

Nurmia, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Administrasi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda dengan judul skripsi Kontribusi Terminal Petikemas Palaran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, dibawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Hj. Nur Fitriyah, M.S selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. H. Burhanudin, M.Si selaku dosen pembimbing 2.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi terminal petikemas Palaran terhadap Pendapatan Asli Daerah yang ada di kota Samarinda serta melihat upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari terminal petikemas Palaran.

Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bukan hanya terminal petikemas saja yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah di kota Samarinda namun ada sektor lain yang juga menyumbang cukup besar yakni pajak hotel, restoran, reklame, penerangan jalan, pajak air bawah tanah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Implikasi penelitian ini diharapkan agar pihak Dinas Pendapatan Daerah dapat lebih memaksimalkan pendapatan dari terminal petikemas Palaran dan sektor lainnya demi terbentuknya kota Samarinda menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci : Kontribusi, petikemas, Palaran, Dinas Pendapatan Daerah.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : nmia47608@gmail.com

² Dosen Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

³ Dosen Program Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah termasuk dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berprinsip pada pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola daerah masing-masing. Sebagai administrator penuh, masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa faktor kemampuan untuk mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri dari daerah otonom terletak pada kemampuan self supportingnya dalam bidang keuangan termasuk didalamnya adalah kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan dengan baik dan menggunakannya secara tepat dan benar. Daerah harus mempunyai sumber-sumber keuangan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan otonominya.

Salah satu usaha pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah, infrastruktur menjadi salah satu kunci utama bagi daerah mengembangkan potensi yang dimiliki. Infrastruktur dan sarana prasarana yang ada di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Salah satu ifrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pelabuhan.

Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi yang kaya di Indonesia. Menjadi salah satu provinsi yang kaya di Indonesia dengan memiliki sumber daya alam yang melimpah tentu menyebabkan adanya kegiatan ekspor impor antar kota, pulau maupun provinsi. Dengan adanya sarana akomodasi berupa pelabuhan yang menghubungkan Kalimantan Timur khususnya Samarinda dengan kota-kota maupun provinsi lainnya di Indonesia, sehingga dapat memudahkan kegiatan ekspor impor.

Berdasarkan hasil pemikiran para jajaran Pemkot tersebut, serta dukungan dari pihak lain yang terkait maka dibangunlah terminal petikemas Palaran yang dilatarbelakangi oleh terbatasnya kapasitas dan fasilitas pelabuhan Samarinda. Dengan adanya terminal petikemas yang modern di harapkan bermanfaat bagi peembangan ekonomi kota Samarinda.

Dengan berdasarkan latar belakang demikian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang terminal petikemas Palaran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat mensukseskan pembangunan daerah, dengan judul penelitian mengenai *“Kontribusi Terminal Petikemas Palaran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”*.

Kerangka Dasar Teori

Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi, T Guritno (1992:76) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Pengertian dari kontribusi sendiri ialah tidak terbatas pada pemberian bantuan berupa uang saja, melainkan bantuan dalam bentuk lain seperti bantuan tenaga, bantuan pemikiran, bantuan materi, dan segala macam bentuk bantuan yang kiranya dapat membantu suksesnya kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama.

Dari pengertian dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan sumbangan baik berbentuk materi dan non materi yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan maupun aktifitas untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Pelabuhan

Menurut Lasse (2014:4) pelabuhan diartikan juga sebagai area tempat kapal dapat melakukan kegiatan pemuatan atau pembongkaran kargo, termasuk dalam area dimaksud suatu lokasi dimana kapal dapat antri menunggu giliran atau tunggu perintah aktivitas. Dapat pula diartikan sebagai terminal dan area dimana kapal-kapal memuat atau membongkar muatan di dermaga, di lokasi labuh, di bui pelampung atau sejenisnya dan mencangkup perairan tempat menunggu giliran mendapatkan pelayanan.

Menurut Sasono (2012:49) pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat transportasi.

Dari beberapa pengertian dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelabuhan adalah suatu pintu gerbang dan memperlancar hubungan antar daerah pulau atau bahkan antar benua dan bangsa, yang dapat memajukan daerah yang memiliki kepentingan hubungan ekonomi, sosial dan lain-lain dengan pelabuhan tersebut.

Terminal Petikemas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan pada pasal 22 ayat 2, terminal petikemas merupakan salah satu fasilitas pokok yang ada di pelabuhan berdasarkan kriteria kebutuhan.

Menurut Suyono (2001:270) terminal petikemas adalah terminal yang dilengkapi sekurang-kurangnya dengan fasilitas berupa tambatan, dermaga, lapangan penumpukan (container yard), serta peralatan yang layak untuk melayani kegiatan bongkar muat petikemas.

Secara umum fungsi suatu terminal petikemas meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan bongkar atau muat (*ship planning*).
2. Bongkar atau muat serta pergerakan atau pemindahan petikemas (*container handling*).
3. Mengisi dan mengosongkan petikemas (*stuffing strip-ping containers*).
4. Penyimpanan barang (*storage*).
5. Perawatan alat bongkar muat (*equipment maintenance*).
6. Penimbunan petikemas (*containers stacking*).
7. Perawatan dan perbaikan petikemas (*container maintenance and repair*).
8. Melakukan kegiatan administrasi pengoperasian terminal.

Dari pengertian dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terminal petikemas adalah tempat dimana dilakukan pengumpulan petikemas dari pelabuhan lainnya untuk selanjutnya diangkut ke tempat tujuan ataupun terminal petikemas (Unit Terminal Container/UTC) yang lebih besar lagi, yang dioperasikan dengan menggunakan peralatan bongkar muat.

Petikemas

Menurut R.P. Suyono (2005:263) petikemas adalah suatu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu, dapat dipakai berulang kali, dipergunakan untuk menyimpan sekaligus mengangkut muatan yang ada di dalamnya.

Menurut Soedjono Kramadibrata (2002:280) petikemas adalah suatu kotak besar terbuat dari bahan campuran baja dan tembaga (antikarat) dengan pintu yang dapat terkunci dan pada tiap sisi-sisi dipasang suatu piting sudut dan kunci putar sehingga antara satu petikemas dengan petikemas lainnya dapat digunakan dengan mudah disatukan atau dilepaskan.

Berdasarkan Customs Convention on Containers 1972, yang dimaksud dengan petikemas/container adalah alat untuk mengangkut barang yang :

1. Seluruh atau sebagiannya tertutup sehingga menyerupai bentuk peti yang didalamnya dimaksudkan untuk diisi barang yang akan diangkut.
2. Berbentuk permanen dan kokoh sehingga dapat dipergunakan berulang kali untuk mengangkut barang.
3. Dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengangkutan barang dengan suatu kendaraan tanpa terlebih dahulu dibongkar.
4. Dibuat sedemikian rupa untuk langsung dapat diangkut, khususnya apabila dipindah dari satu ke lain kendaraan.
5. Dibuat sedemikian rupa sehingga mudah diisi dan dikosongkan.
6. Mempunyai ukuran bagian dalam sebesar 1 m atau lebih.

Dari beberapa pengertian dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa petikemas adalah suatu kemasan yang dirancang secara khusus dengan ukuran tertentu dan dapat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dimana kotak tersebut dapat diisi dengan berbagai macam barang yang akan dikirim ke tempat tujuan.

Keuangan Daerah

Menurut Tjahja Supriatna (2012), keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber kuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (PBD).

Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 dijelaskan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Hal ini diperjelas dalam PP No. 58 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa keuangan daerah meliputi :

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pajak pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah, pengeluaran daerah.
4. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
5. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Dari beberapa pengertian dan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban suatu daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan daerah sesuai dengan undang-undang yang telah berlaku di masing-masing daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Ada empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (Mardiasmo, 2002:132).

Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut undang-undang pasal 6 No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah.

Atik Norhayati (2011:5) mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, berbagai kegiatan pemerintah baik tugas pokok maupun tugas pembantuan harus diimbangi oleh adanya PAD, sebagai media penggerak program pemerintah daerah. Agar keberadaan PAD berjalan lancar, maka jumlah pendapatan minimal seimbang dengan pengeluaran artinya tidak besar pasak daripada tiang, oleh karena itu pemerintah daerah harus mempunyai strategi dalam pengelolaan PAD terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Dari beberapa pengertian dan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu pendapatan/penerimaan rutin yang menunjukkan suatu kemampuan daerah dalam menghimpun/mengumpulkan sumber-sumber dana dari daerahnya untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan masing-masing daerahnya.

Kontribusi Terminal Petikemas Palaran dalam Meningkatkan PAD Kota Samarinda

Kontribusi merupakan sumbangan, sokongan atau dukungan terhadap sesuatu kegiatan. Arti kontribusi juga berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.

Kontribusi terminal petikemas Palaran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Samarinda adalah bentuk dari sumbangan atau sokongan dari terminal petikemas Palaran kepada Pendapatan Asli Daerah yang dianggap cukup untuk membiayai pembangunan daerah di Kota Samarinda, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota tersebut.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu pengertian secara konsep, mengenai variabel-variabel yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan.

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan definisi konsepsional yang menyangkut judul skripsi agar mempermudah dalam memahami maksud pembahasan ini.

Sesuai dengan judul penulis yaitu : “Kontribusi Terminal Petikemas Palaran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda”, maka penulis merumuskan definisi konsepsional adalah :

Kontribusi terminal petikemas Palaran dalam meningkatkan PAD kota Samarinda memiliki pengertian sumbangsih yang diberikan terminal petikemas terhadap PAD yang berupa pendapatan daerah dianggap cukup untuk membiayai pembangunan daerah di kota Samarinda yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda.

Metode Penelitian

Fokus penelitian berisi rincian pernyataan tentang topik-topik pokok yang akan diungkap dalam penelitian ini, yaitu:

1. Target dan realisasi terminal petikemas Palaran tahun 2013-2015.
2. Kontribusi yang diberikan terminal petikemas Palaran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
3. Upaya Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari terminal petikemas Palaran.

Jenis dan sumber data

Menurut Suharsimi Arikunto (1997:114), bahwa yang di maksud dengan sumber data adalah subjek darimana data dapat di peroleh. Atau dalam bukunya Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, edisi revisi VI (2002:107). Yang di maksud dengan sumber data adalah benda, hal atau orang tempat peneliti mengamati, membaca atau bertanya tentang data atau subjek darimana data di peroleh.

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh melalui informan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dan di padu melalui pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti. Dengan kalimat lain data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari informan dengan wawancara terstruktur dan menggunakan tanya jawab sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. Informan yang di maksud adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Staff Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda.

2. Data sekunder

Data sekunder atau data pendukung ini adalah semua data yang diperoleh dari studi pustaka untuk beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat opini yang sudah ada sehingga akan mampu menambah keyakinan penulis terhadap suatu kesimpulan penelitian. Adapun wujud dari data sekunder yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumen-dokumen, laporan hasil evaluasi. Beberapa dokumen yang dimaksud adalah data pendapatan daerah kota Samarinda dari tahun 2013 sampai tahun 2015 yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Daerah atau Perpustakaan Daerah.
- b. Buku-buku referensi hasil penelitian dan media masa yang relevan dengan fokus penelitian.

Informan, menurut Lexy J. Moleong (2000:90) adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data atau key informan di tentukan dengan Teknik Purposif Sampling. Menurut sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Administrasi (2006:96), Teknik Purposif Sampling yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana informasi atau data yang di perlukan dikumpulkan dengan memilih informan yang di anggap paling tau dan dapat di percaya sebagai sumber data. Alat pengumpul data atau instrumen peneliti ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi Terminal Petikemas Palaran Tahun 2013-2015

Berikut dikemukakan mengenai target dan realisasi terminal petikemas Palaran tahun 2013-2015, hal tersebut dapat disampaikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1

Target dan Realisasi Terminal Petikemas Palaran Tahun 2013-2015

NO.	TAHUN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	2013	5.000.000.000,00	4.446.829.913,00	88,94
2.	2014	20.000.000.000,00	5.624.695.295,40	28,12
3.	2015	20.000.000.000,00	12.025.077.545,56	60,13

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan dari realisasi penerimaan terminal petikemas Palaran sangat baik, dari tahun ke tahunnya selama tiga tahun dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target. Penerimaan terminal petikemas pada tahun anggaran 2013 cukup baik namun tidak mencapai target yaitu hanya mencapai Rp 4.446.829.913,00 atau 88,94%, hal ini disebabkan karena pada awal bulan Februari 2013 semua kegiatan bongkar muat dari Pelabuhan Samarinda sudah dilakukan di terminal petikemas Palaran sehingga terjadi peningkatan volume petikemas yang cukup signifikan yang menyebabkan produktifitas bongkar muat diturunkan. Pada tahun anggaran 2014 target meningkat sebesar 5.000.000.000 menjadi 20.000.000.000. Lalu pada tahun 2014 realisasi penerimaan terminal petikemas turun drastis menjadi 5.624.695.295,40 atau 28,12 %, hal ini disebabkan karena terjadi demo warga dan supir truck eksternal. Selanjutnya pada tahun 2015 sudah ditambah daya tampung 100.000 TEUs dan perkuatan dermaga sehingga penerimaan mengalami kenaikan kembali menjadi 12.025.077.545,56 atau 60,13% dengan

target yang sama di tahun 2014 yaitu sebesar 20.000.000.000. Tahun 2013 merupakan persentase tertinggi jika dibandingkan dengan tahun lainnya, yaitu 88,94%. Sementara penerimaan yang tertinggi adalah tahun 2015 yaitu sebesar 12.025.077.545,56. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Kota Samarinda periode 2013-2015 bahwa penerimaan terminal petikemas Palaran menunjukkan adanya peningkatan.

Kontribusi Terminal Petikemas Palaran Terhadap PAD Samarinda

Selanjutnya dikemukakan mengenai kontribusi yang diberikan terminal petikemas Palaran terhadap PAD Samarinda, untuk mengetahui lebih jelas dapat ditampilkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Kontribusi Terminal Petikemas Palaran terhadap PAD Samarinda

NO.	TAHUN	REALISASI TPK (Rp)	REALISASI PAD (Rp)	%
1.	2013	4.038.820.138,00	338.198.759.081,33	1,20
2.	2014	5.624.695.295,40	429.417.431.103,56	1,31
3.	2014	12.025.077.545,56	408.176.182.511,00	2,95

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda

Dilihat dari table diatas dapat diketahui bahwa kontribusi terminal petikemas Palaran terhadap PAD selama tahun 2013-2015 selalu mengalami peningkatan, dimana tingkat kontribusinya mencapai persentase 1,20% hingga 2,95%. Pada tahun 2013 dari 1,20% menjadi 1,31% pada tahun 2014 dan naik kembali menjadi 2,95% pada tahun 2015. Tahun 2015 kontribusi terminal petikemas Palaran yang paling tertinggi yaitu 2,95% sedangkan kontribusi terendah ada pada tahun 2013 1,20%. Maka pada tahun 2013-2015 terminal petikemas Palaran memberikan kontribusi rata-rata sekitar 1,85% terhadap PAD Kota Samarinda.

Faktor Penghambat

1. Adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura).
Praktik pungutan liar di terminal petikemas Palaran Samarinda diduga sudah berlangsung lama. Salah satu modus untuk menarik pungutan adalah memanfaatkan tenaga buruh agar retribusi liar masuk ke kantong-kantong pengelola pelabuhan. Praktek pungli lainnya yaitu adanya penarikan retribusi itu ada di dua titik di pelabuhan, pintu masuk dan saat proses bongkar muat.
2. Bongkar muat terminal petikemas Palaran mengalami overload.
Melihat dari kondisi pelabuhan Palaran yang melewati wilayah padat penduduk sehingga pihak pelabuhan Samudera harus membeli beberapa wilayah tanah untuk memuat parkir di badan jalan. Tetapi semakin berkembangnya dan banyaknya container serta truk pengangkut, kadang-

- kadang pool atau area badan jalan pun tidak mencukupi untuk dijadikan tempat parkir truk yang akan mengangkut bongkar muat.
3. Pembangunan akses jalan belum optimal.
Prasarana jalan yang telah ditentukan oleh Dinas terkait belum sepenuhnya sesuai, hal ini menjadi penyebab seringnya keterlambatan truk bongkar muat sampai di lokasi. Lokasi pelabuhan Palaran yang melalui perumahan padat penduduk menjadi sangat riskan untuk mengejar waktu. Beratnya beban container bongkar muat tidak sesuai dengan kemampuan beban jalan, sehingga seringnya terjadi kerusakan jalan yang berulang kali pada perumahan padat penduduk.
 4. Jarak pelabuhan terminal petikemas Palaran yang cukup jauh.

Faktor Pendukung

1. Sistem pembayaran online.
Melalui layanan transaksi online yang menggunakan sistem host to host collection ini, pelanggan PSP dapat melakukan pembayaran langsung di seluruh kantor cabang Bank Mandiri dan jaringan ATM maupun jaringan internet banking dengan menggunakan nomor referensi unik untuk setiap pelanggan. Nomor referensi itu juga terakses pada sistem di PSP, sehingga unit usaha Samudera Indonesia Group itu dapat memperoleh informasi transaksi pembayaran secara real time dan proses rekonsiliasi dapat segera dilakukan.
2. Menggunakan peralatan bongkar muat yang canggih.
Terminal petikemas Palaran dioperasikan dengan menggunakan peralatan bongkar yaitu 2 unit CC dan 5 unit RTG yang merupakan produksi dari *crane maker* Korea Merek Doosan yang diproduksi di Vietnam.

Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan PAD dari Terminal Petikemas Palaran

Ukuran keberhasilan pada pendapatan terminal petikemas Palaran tersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan pendapatan dari penerimaan terminal petikemas Palaran, dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi penerimaan terminal petikemas Palaran maka tercapainya target penerimaan terminal petikemas Palaran akan ditentukan oleh sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD dari terminal petikemas Palaran. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda dalam meningkatkan PAD kota Samarinda dari terminal petikemas Palaran adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah terus berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dengan gencar mensosialisasikan skema kerjasama pemerintah dan swasta yang merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi kendala keterbatasan pendanaan. Salah satunya pembangunan terminal petikemas Palaran.
2. Mensosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada masyarakat sekitar

- yang tinggal dekat dengan pelabuhan terminal petikemas palaran tentang proyek diselenggarakan untuk mendapatkan informasi mengenai manfaat dan dampak dibangunnya terminal petikemas Palaran.
3. Pemerintah mempermudah perolehan perijinan yang terkait dengan proyek terminal petikemas Palaran dan adanya jaminan pemerintah berupa kemudahan dan tidak terjadinya hambatan pada proses pengadaan tanah. Seperti perijinan pembebasan lahan terhadap masyarakat sekitar sehingga kedepannya tidak terjadi sengketa lahan.
 4. Pemerintah membangun jalan akses dari dan menuju lokasi terminal petikemas Palaran, yang menjadi tanggung jawab Pemerintah kota Samarinda.
 5. Membuat kesepakatan bersama antara PT Pelabuhan Indonesia IV, PT Pelabuhan Samudera Palaran dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan terminal petikemas Palaran.
 6. Melakukan pengawasan rutin dan audit rutin serta pengendalian di lapangan, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan terminal petikemas Palaran dan juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang semakin baik.
 7. Menaikkan tarif terminal petikemas Palaran yang disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang diberikan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terminal petikemas Palaran dari realisasi penerimaan terminal petikemas Palaran sangat baik, dari tahun ke tahunnya selama tiga tahun dari tahun 2013-2015 mengalami peningkatan walaupun belum mencapai target. Hal tersebut jelas terlihat dimana kontribusi di tahun 2013 mencapai 4.446.829.913,00, pada tahun 2014 mencapai 5.624.695.295,40 dan pada tahun 2015 mencapai 12.025.077.545,56.
- b. Kontribusi terminal petikemas Palaran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda selama periode 2013-2015 mengalami peningkatan. Peningkatan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2015 mencapai 2,95% sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2013 yang hanya mencapai sebesar 1,20 dan rata-rata kontribusi terminal petikemas Palaran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda mencapai sekitar 1,85% per tahun.
- c. Ditinjau dari perannya, penerimaan terminal petikemas Palaran memiliki peran yang tidak terlalu besar bagi Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda dibandingkan dengan pajak daerah atau retribusi daerah lainnya. Terminal petikemas juga memiliki pengaruh bagi PAD kota Samarinda, karena apabila terminal petikemas tidak memberikan kontribusi sesuai target atau kurang dari yang ditargetkan maka PAD kota Samarinda juga akan berkurang nilainya.
- d. Dengan melihat proporsi potensi terminal petikemas Palaran dan realisasinya terhadap target terminal peti kemas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa pemerintah Daerah tidak memperhitungkan potensi yang ada dalam menetapkan target terminal petikemasnya serta belum optimalnya

- e. pengggalian potensi terminal petikemas yang ada.
- f. Maksud dari proyek pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran adalah untuk mewujudkan sinergi antara Pemerintah Kota Samarinda dan PT Pelabuhan Indonesia IV dengan investor dalam melaksanakan pengembangan pelabuhan umum Samarinda yaitu pembangunan dan pengoperasian Terminal Petikemas Palaran. Adapun tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengembangkan kapasitas pelayanan petikemas pada Terminal Petikemas Palaran.
- g. Dapat disimpulkan bahwa struktur dan kecepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional banyak ditentukan oleh kualitas dari sistem transportasi salah satunya kualitas pelabuhan.

Saran

- a. Melalui pola kerjasama Pemerintah dan swasta diharapkan dapat memberikan pelayanan umum yang lebih baik, mengingat selama ini swasta umumnya lebih responsif dalam penggunaan teknologi baru yang efisien dan menerapkan manajemen pengelolaan yang modern sehingga dipandang mampu menyediakan jasa infrastruktur yang lebih murah dan terjangkau.
- b. Hasil penelitian menunjukkan terminal petikemas Palaran memiliki tingkat kontribusi yang cukup tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda. Kondisi ini hendaknya menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah untuk melakukan upaya-upaya yang dapat menjaga dan meningkatkan kontribusi terminal petikemas Palaran dengan melakukan koordinasi dengan aparat terkait.
- c. Perlu adanya suatu pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan agar tidak keluar dari standar pelayanan minimum yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan yang profesional, efektif dan efisien. Pengawasan dan pengendalian ini perlu dilakukan secara berkala oleh pihak-pihak yang terlibat terutama pemerintah.
- d. Dengan potensi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Samarinda, diharapkan Pemerintah Daerah sigap dan tanggap dalam menyikapi keadaan yang ada agar menjadi peluang dalam meningkatkan penerimaan daerah khususnya dari aspek terminal petikemas Palaran sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah.
- e. Kerjasama yang telah dilakukan antara Pemerintah dengan PT Pelindo IV dan PT Samudera Palaran sudah membuahkan hasil, tetap pertahankan kerjasama ini dan selalu membina hubungan dengan baik.
- f. Hendaknya menindak tegas atau memberikan sanksi kepada petugas yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas.
- g. Agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik maka diharapkan: 1) Menambah dengan data primer yaitu berupa wawancara lebih lanjut dengan pengelola Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda mengenai upaya apa saja yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan PAD dari terminal petikemas

Palaran, 2) Periode yang diteliti hendaknya lebih dari periode yang telah diteliti atau dapat melakukan penelitian dengan periode terbaru, 3) Ada kemungkinan alat analisis lain yang lebih lengkap untuk melihat pertumbuhan terminal petikemas Palaran terhadap PAD dalam jangka waktu 3 tahun kedepan atau dengan menganalisis lebih mendalam tentang penyebab fluktuasi pertumbuhan terminal petikemas Palaran terhadap PAD dan upaya kongkrit Pemerintah Daerah dalam meningkatkan PAD khususnya dari terminal petikemas Palaran tersebut.

Daftar Pustaka

- Imam, Soebechi. 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri)*. Jakarta Barat: Indeks.
- _____. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- _____. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Anwar, Syaiful. 1996. *Sendi-sendi Hukum Tata Negara*. Bandung: Tarsito.
- Pandiangan, Liberty. 2002. *Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Supormoko, M. 2002. *Ekonomi Publik Untuk keuangan & Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Admadja, Arifin P. Soeria. 2010. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Edisi ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Marihot. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad, Yani, SH, MM. Ak. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia*: Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Riadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suandi, Edy dan Hamid. 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekarwo. 2003. *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mubyarto. 2001. *Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Suara Pembaruan. 2002. *Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan*.

Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.

Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta:Universitas Indonesia.

Rustiadi, Ernan, *Sunsun Saefulhakim dan Dyah R. Panuju*. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta:Crestpent Peress dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nitisastro, Widjojo. 2010. *Pengalaman Pembangunan Indonesia*. Jakarta:Kompas

Abdulla, Pitter, dkk. 2002. *Daya Saing Daerah Konsep dan Pengukurannya di Indonesia*. Yogyakarta:BPFE.

Dokumen-dokumen :

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 05 tahun 2004 *Tentang Kepelabuhanan di Kota Samarinda*

Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2009 *Tentang Kepelabuhanan*

Undang-undang *Pelayaran* No. 17 tahun 2008

Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2010 *Tentang Angkutan di Perairan*

Sumber Internet :

Shinta, Andria Dewi. 2011. “Analisis Faktor Penentu Keberhasilan Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Pembangunan Terminal Peti Kemas”.

file:///D:/SKRIPSI/file%20skripsi/Tesis%20TPK.pdf (diakses 10 Mei 2015)

Lazio, Sonny.2012. “Pengertian dan Sumber Sumber Pendapatan”.

Html<http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-Sumber-pendapatan.html> (diakses 7 April 2015)

Saragih, Panglima, J. 1996. “Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah”. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, No. 06, Edisi September/Oktober. (diakses 15 Februari 2015)